

---

**KEPASTIAN HUKUM MAGANG CALON NOTARIS PADA DAERAH YANG  
MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR****Muhammad Maghfur Agung**

Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang, Indonesia

Email: magfurmuhhammad@gmail.com

---

**Artikel info****Artikel history**

Diterima :11-12-2020

Diterima dalam bentuk  
revisi : 12-01-2021Diterima dalam bentuk  
revisi :19-01-2021**Kata Kunci:** kepastian  
hukum; magang calon  
notaris; pembatasan social  
berskala besar**Keywords:** *legal certainty;  
apprenticeship for  
prospective notaries; large-  
scale social restrictions*

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah hukum terkait kepastian hukum pemagangan calon notaris di daerah dengan batasan sosial skala besar. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai badan layanan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC). Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan pembatasan sosial secara besar-besaran. Pembatasan sosial skala besar telah menyebabkan terjadinya liburan di tempat kerja. Kandidat notaris yang terlibat dalam pelatihan magang karena pembatasan sosial skala besar sedang cuti. Masalahnya, jika daerah menetapkan batasan sosial skala besar, sehingga menghilangkan jumlah pemagangan calon notaris, maka hitungan 24 bulan magang bagi calon notaris akan diabaikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan metode penelitian di atas, penulis mengedepankan jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu di daerah dengan batasan sosial yang besar, kepastian hukum pemagangan kuasi notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Abstract**

*This study aims to discuss legal issues related to legal certainty of apprenticeship for notary candidates in regions that have large-scale social restrictions. WHO has set COVID-19 as a Public Health Service of International Concern (PHEIC). Controlling the spread of Covid-19 The Indonesian government has implemented several strategies, one of which is the large-scale social restrictions. Large-scale social restrictions result in workplace vacations. Notary candidates who carry out apprenticeships due to large-scale social restrictions are on vacation. The problem is the counting of 24 months of apprenticeship for notary candidates if the region determines large-scale social restrictions so that the apprenticeship places of prospective notaries are canceled. This research is a normative juridical research. From the results of the research with the method above, the authors obtained answers to the existing*

*problems that the legal certainty of the apprenticeship of prospective notaries in areas that set large-scale social restrictions is based on statutory regulations.*

---

**Correspondence author:** Muhammad Maghfur Agung

Email: magfurmuhammad@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

## **Pendahuluan**

Adanya virus corona (Covid-19) membuat dunia saat ini menghadapi tekanan yang cukup sulit. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, infeksi Covid-19 merupakan masalah kesehatan dunia. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi untuk mencegah Covid-19. Covid-19 berdampak pada stabilitas negara dari aspek ekonomi dan pendidikan. Masing-masing wilayah wilayah memiliki keahlian dalam mencegah penanganan Covid-19, salah satunya melalui penerapan batas sosial berskala besar.

Disebutkan bahwa “batas sosial pemerintah yang besar merupakan bentuk pencegahan Covid-19. Landasan hukum PSBB tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan dan Karantina Tahun 2018 (Sari, 2020). Dengan berlakunya PSBB, tempat kerja akan libur, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 Kesehatan Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID- 19 Pasal 13 yaitu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Menurut peraturan ini, empat pekerjaan dibebaskan. Kantor atau badan strategis yang memberikan layanan terkait keamanan dan keamanan, barang publik, kebutuhan pangan, bensin dan gas alam, utilitas dan utilitas umum tidak termasuk pekerjaan. Kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Status Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat surat kuasa dan melakukan perbuatan melawan hukum lain yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain. Keuntungan dari notaris adalah dapat membuat surat kuasa. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan karya notaris dalam perkembangan dunia. Persyaratan untuk diangkat sebagai notaris berdasarkan Pasal 3 UU Status Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

Bagi calon notaris, Pasal 3 UUN huruf f harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut, yaitu pegawai yang telah menjabat sebagai notaris selama 24 bulan berturut-turut (dua puluh menit) telah lulus pendidikan kedokteran yang kedua, menurut organisasi notaris. Saran.

Selama pandemi Covid-19, untuk wilayah yang belum diundangkan, "Greater Social Restriction" tidak bermasalah karena keempat karya tersebut belum diklasifikasikan. Namun, untuk wilayah yang diidentifikasi PSBB akan ada empat posisi. Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, klasifikasi jabatan notaris tidak mengecualikan empat pekerja. Calon notaris bukan merupakan staf kantor notaris, melainkan karena adanya kewajiban magang, oleh karena itu calon notaris harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di lokasi calon notaris.

Seperti terlihat dari penjelasan di atas, untuk sementara ditetapkan bahwa notaris magang di daerah ini banyak calon magang notaris. UUN tidak memiliki peraturan khusus tentang jam kerja kantor notaris. Menurut Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan dan Karantina Tahun 2018, pembatasan sosial skala besar merupakan bagian dari

tanggap darurat kesehatan masyarakat. Dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, liburan sekolah dan kerja menjadi yang pertama, diikuti dengan pembatasan kegiatan keagamaan, dan kedua, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Oleh karena itu, terdapat permasalahan hukum dari kajian ini, yaitu jika daerah menetapkan PSBB, tidak ada persyaratan dalam UUJN calon notaris untuk mematuhi UUJN pasal 3f. Di daerah tempat PSBB dilaksanakan, alasan tidak adanya kuasi notaris yang akan menerapkan peraturan dalam pemagangan adalah karena UUJN tidak mengaturnya. Pertanyaannya, apakah masa magang calon notaris akan dihitung jika berlibur di tempat kerja, belum ada kepastian hukum jika tidak ada ketentuan tentang magang calon notaris. Karena permasalahan tersebut, pemerintah mengajukan hak kepastian hukum pemagangan bagi calon notaris di daerah dengan batas sosial yang luas.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah (studi pustaka), atau studi pustaka dengan menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Karena ada banyak metode dalam penelitian hukum, metode tersebut harus mengikuti berbagai aturan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum adalah hukum perundang-undangan, metode konseptual, yaitu pengumpulan data melalui kepustakaan berupa buku ilmiah dan informasi hukum, menganalisis dan merumuskannya. Kemudian hubungkan gejala hukum yang muncul dengan masalah hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kelsen percaya bahwa hukum adalah sistem normatif. Spesifikasi tersebut menekankan pada pernyataan "harus" atau "standar" dengan memasukkan beberapa aturan tentang pengoperasian. Norma adalah produk dari musyawarah dan perilaku manusia. Hukum yang memuat aturan-aturan umum, baik itu hubungan dengan teman sebaya maupun dengan masyarakat, dapat dijadikan pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi beban sosial atau batasan atas tindakan individu. Adanya regulasi dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum (Marzuki, 2008)

Kepastian mengacu pada peraturan tertentu atau hal-hal yang ditentukan (syarat). Hukum harus bersifat deterministik dan adil. Tentunya ini adalah code of conduct dan code of fairness, karena code of conduct tersebut harus mendukung perintah yang dianggap wajar. Hanya jika hukum ditegakkan secara adil dan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan dari perspektif sosiologis (Rato, 2010)

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang memuat keadilan. Norma yang mempromosikan keadilan harus benar-benar menjadi aturan yang harus dipatuhi. Dalam merumuskan aturan hukum, prinsip utamanya adalah menegakkan kejelasan peraturan perundang-undangan, yaitu kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian permanen dari hukum. Ia meyakini bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban negara. Terakhir, hukum positif harus selalu diperhatikan. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang harus diwujudkan yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Andyastuti & Husaini, 2013)

Menurut teori kepastian hukum yang disebutkan di atas, magang diterapkan kepada notaris di daerah di mana pembatasan sosial skala besar ditentukan. Karena undang-undang Kantor Notaris tidak menentukan sistem magang notaris saat menghitung masa magang 24 bulan, notaris yang menerima magang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem magang untuk notaris yang dituju. Apakah magang termasuk dalam PSBB karena keadaan darurat kesehatan masyarakat? Apakah otoritas penerima magang notaris dihitung.

Contoh dari kejadian luar biasa yang mengakibatkannya pelaksanaan PSBB ini terjadi di masa Pandemi Covid-19. Penetapan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam mengakibatkan beberapa daerah memberlakukan PSBB. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka berimplikasi pula terhadap penegakan hukum pidana. Setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana.

PSBB merupakan bagian dari "Tanggap Darurat Kesehatan Masyarakat", yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit saat ini di antara masyarakat di daerah tertentu. Pelaksanaan PSBB harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan, pada dasarnya mengatur dua hal,

Pertama, Covid-19 diakui sebagai penyakit yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Kedua, kondisi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan ketentuan hukum (RI et al., 2020).

Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menekan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) pada 2019, Menteri Kesehatan dapat menetapkan batasan sosial berskala besar. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka Percepatan Pengobatan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) Untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar, provinsi / wilayah / kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. :

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain

Atau kaidah-kaidah sikap dan perilaku yang terwujud dalam terciptanya keteraturan dalam interaksi sosial antar manusia (Murino, 2017) Mengenai sistem pemagangan bagi kuasi-notaris pada saat pandemi, dan PSBB ditetapkan di daerah, undang-undang melindungi hak-hak kuasi-notaris agar tidak mengarah pada realisasi hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan salah satu contoh peran fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum (yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum).

Pada dasarnya setiap orang berhak dilindungi undang-undang. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, terdapat beberapa perlindungan hukum. Asas perlindungan hukum dari tindakan pemerintah berawal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir untuk membatasi dan mengatur kewajiban sosial. Dan pemerintah.

Menurut (Halim, 2017) Hukum diyakini dapat digunakan untuk mencapai perlindungan, yang tidak hanya mudah beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan berwawasan ke depan. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa bagi masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik namun belum kuat maka hukum diperlukan untuk memperoleh keadilan sosial (Ratnaningsih, 2016).

Memberikan penjelasan perlindungan hukum kepada calon notaris yang magang karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Calon notaris yang memenuhi persyaratan hukum merupakan salah satu persyaratan notaris, yaitu masa magang selama 24 bulan memerlukan aturan yang jelas. Karena tidak ada persyaratan khusus, bisa jadi karena masa magang tidak disertakan PSBB. Patokannya, calon notaris wajib melaksanakan magang sesuai dengan Pasal 7 PERKUM nomor: 10 / PERKUM / INI / 2018, dimana waktu magang adalah setiap hari kerja, paling sedikit tiga hari per 1 (satu) minggu, dan paling sedikit 4 (empat) jam masing-masing hari.

Perlu dilindungi sesuai dengan peraturan terkait tentang magang. Intinya, setiap orang berhak dilindungi undang-undang. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Termasuk magang, notaris kuasi ini perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif dirancang untuk mencegah perselisihan yang menginstruksikan setiap tindakan untuk berhati-hati saat mengambil keputusan. Perlindungan hukum preventif telah diterapkan dengan baik, sehingga hak-hak calon notaris yang magang sangat ditentukan. Perlindungan preventif bagi calon notaris yang telah melaksanakan sistem pemagangan notaris selama 24 bulan adalah dengan merumuskan peraturan yang jelas tentang penyelenggaraan magang dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi harkat dan martabat calon notaris dan menegakkan kepastian hukum.

### **Kesimpulan**

Kepastian hukum magang calon notaris pada daerah yang menetapkan PSBB yaitu karena terjadi peliburan tempat kerja, maka kantor notaris di liburkan. Calon notaris berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai penghitungan magang 24 bulan pada daerah yang menetapkan PSBB. Contohnya di DKI Jakarta pengurus wilayah DKI Jakarta ikatan notaris mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta agar jabatan notaris dan PPAT kantornya di kecualikan atau tidak di liburkan. Ketidakjelasan mengenai konsep kantor notaris masuk di wilayah mana yang mengakibatkan banyak terjadi multi tafsir.

Akibat hukum dari pelaksanaan PSBB terhadap calon notaris karena penetapan daerah Pembatasan Sosial bersekala besar yaitu karena adanya kedaruratan Kesehatan makan mengakibatkan peliburan tempat kerja. Calon notaris yang sedang magang di kantor notaris berpotensi diliburkan apabila kantor notaris di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk tutup. Akan tetapi penghitungan masa waktu magang 24 bulan calon notaris, karena tidak di atur secara spesifik dan mengacu pada pasal 7 PERKUM nomor: 10/PERKUM/INI/2018, maka penghitungan waktu magang diberikan sepenuhnya kepada penanggung jawab magang yaitu notaris penerima magang. Notaris juga dalam hal ini menjadi penanggung jawab karena notaris sebagai pimpinan di tempat kerja. Apabila terjadi pelanggaran terjadi di lingkungan kerja maka pimpinan tempat kerja atau notaris mendapatkan sanksi berupa denda

### **Bibliografi**

- Andyastuti, L., & Husaini, A. (2013). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 182–191.
- Halim, D. P. (2017). Tinjauan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Dan Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum*, 3(1).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenda Media, Jakarta.
- Murino, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Hiv/Aids Yang Ditolak Oleh Rumah Sakit. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1(6).
- Ratnaningsih, E. (2016). Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi. *Pakuan Law Review*, 4(1).
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- RI, B. K. D. P. R., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. (2020). *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*.